



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BATAM

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FIRMANSYAH BIN ABDUL KADIR**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **62395**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.436.644.849**

1. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA ROKAN HILIR, HASIL SENDIRI , Rp. 70.355.020
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.212.467.484
3. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 422.130.126
4. Tanah Seluas 1.250 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 281.420.084
5. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 422.130.126
6. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 28.142.009

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 324.738.842**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS SEDAN Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 97.818.354
2. MOBIL, TOYOTA VELOZ 1500 Q CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 190.008.788
3. MOTOR, BENELLI BS-200RTM/T SPD MOTOR R2 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 36.911.700

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 267.064.195**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	789.375.513
F. HARTA LAINNYA	Rp.	207.623.697
Sub Total	Rp.	4.025.447.096
III. HUTANG	Rp.	84.966.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.940.481.096

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.